

**RENCANA KERJA  
PERUBAHAN**



**DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA BEKASI  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025 akhirnya dapat kami susun dengan segala keterbatasan yang ada.

Renja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai dan dalam kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan berbagai potensi dan hambatan yang ada agar dapat tercapai/terwujud target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029. Renja ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan serta program dan kegiatan yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diharapkan, dengan memperhitungkan capaian yang telah dicapai sampai dengan tahun sebelumnya.

Dalam penyusunan Perubahan Renja ini masih perlu dimatangkan lagi melalui berbagai kegiatan antar seluruh komponen organisasi agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat sejalan dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 ini.

Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025 untuk dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan seluruh komponen organisasi dalam waktu satu tahun ke depan.

Kepala Dinas Perhubungan



Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Zeno Bachtiar'.

Zeno Bachtiar, S.Si.T., M.Si., M.T  
Pembina Tk.I/IV.b  
NIP. 19730211 199203 1 002

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan tuntutan yang paling aktual dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dengan baik merupakan pengaruh globalisasi serta implikasi meningkatnya pengetahuan dan pengawasan masyarakat. Dengan demikian menuntut perubahan paradigma dan pelayanan publik yang menghendaki adanya perilaku pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Begitu pula halnya dengan Dinas Perhubungan Kota Bekasi yang tidak terlepas dari tuntutan publik tersebut. Sebagai Dinas yang berada pada posisi dengan pertumbuhan cepat dan strategis, Dinas Perhubungan memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada masyarakat. Oleh karena itu Dinas Perhubungan akan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan semaksimal mungkin.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Bekasi dititikberatkan pada pelayanan publik dalam bidang transportasi jalan, yang merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, mendorong pertumbuhan kota melalui kegiatan jasa dan perdagangan. Pentingnya transportasi jalan ini tercermin pada semakin meningkatkan kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang di Kota Bekasi.

Secara umum Dinas Perhubungan telah melaksanakan fungsi di atas, yaitu sebagai unsur pelayanan terhadap masyarakat dan juga Pemerintah Kota Bekasi yang baik dan profesional sehingga dapat menciptakan kesatuan gerak dan langkah dalam suatu rantai kerja yang harmonis di antara Dinas, Pemerintah, dan masyarakat Kota Bekasi. Indikator keberhasilan pelaksanaan fungsi ini adalah adanya suatu tingkat kepuasan baik dari masyarakat maupun Pemerintah Kota Bekasi. Keberhasilan pelaksanaan tugas yang dituangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada pencapaian sasaran yang telah dicapai tiap tahunnya. Dalam melaksanakan kegiatan dan pengukuran kinerja kegiatan telah diidentifikasi secara lengkap dari *input*, *output*, dan *outcome*. Untuk mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai sangat diharapkan adanya kerja sama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dalam memberikan masukan kepada Dinas Perhubungan Kota Bekasi tentang sejauh mana tingkat kepuasan yang diterima oleh masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Sebagai penutup, semoga Rencana Kerja Perubahan (Renja) Tahun 2025 ini bermanfaat bagi pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bekasi yang semakin baik.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.1 Sistematika Penulisan .....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TRIWULAN II TAHUN 2025.....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II .....	8
2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	16
2.3 Perkiraan Pencapaian Kinerja tahun 2025 .....	18
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	20
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025 .....	23
BAB IV PENUTUP.....	34

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hasil Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Bekasi Triwulan II Tahun 2025.....	9
Tabel 2.2	Pencapaian Program dan Kegiatan Tahun 2025 Dinas Perhubungan.	15
Tabel 2.4	Daftar Kegiatan Hasil Verifikasi Usulan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Bekasi TA. 2025.....	21
Tabel 3.1	Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023 .....	26

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Tahunan pada level Satuan Kerja Perangkat daerah dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai tupoksinya.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025 disusun sebagai tindak lanjut atas dinamika pembangunan daerah dan penyesuaian kebijakan strategis pemerintah kota. Kota Bekasi sebagai kota penyangga metropolitan Jakarta terus menghadapi tantangan mobilitas yang kompleks, mulai dari meningkatnya volume kendaraan, keterbatasan kapasitas jalan, kebutuhan integrasi antar moda transportasi, hingga perbaikan layanan parkir dan angkutan umum. Kondisi tersebut mendorong Dinas Perhubungan untuk melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga diperlukan penyesuaian Renja agar lebih responsif terhadap kebutuhan aktual masyarakat serta sejalan dengan target pembangunan daerah.

Selain faktor teknis di lapangan, perubahan Renja ini juga didorong oleh adanya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun 2025. Dokumen ini menjadi pedoman utama bagi perangkat daerah dalam menyusun kembali prioritas pembangunan dan alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, Renja Perubahan Dinas Perhubungan tidak hanya menjadi instrumen penyesuaian program, tetapi juga wujud konsistensi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan Kota Bekasi yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Bekasi melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi

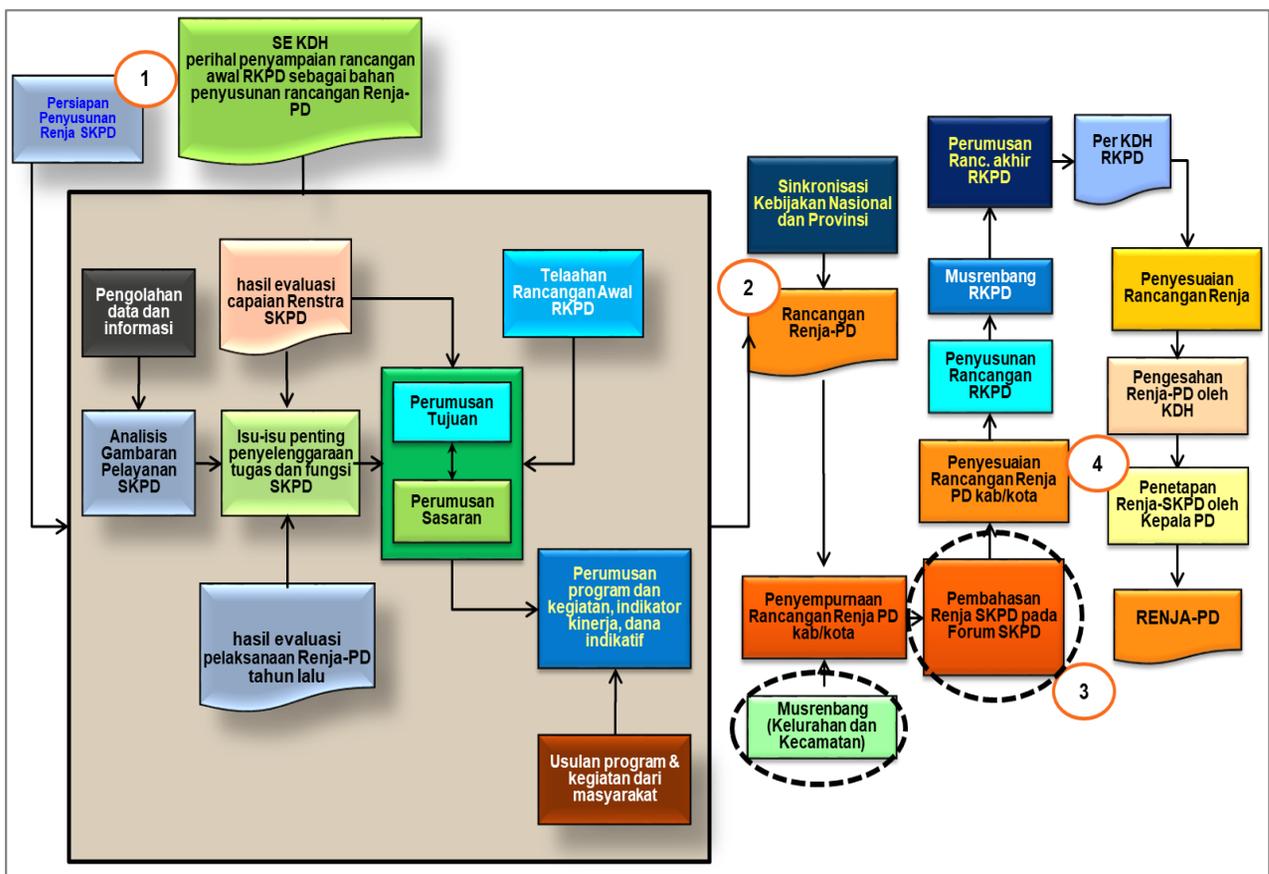
dan tugas pembantuan meliputi lalu lintas, angkutan dan sarana, prasarana dan pengembangan Perhubungan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Kota Bekasi merupakan dokumen perencanaan yang mempedomani Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 dan mengacu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk periode tahun 2025 memuat program/kegiatan perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana transportasi dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek peningkatan pendapatan perekonomian masyarakat maupun peningkatan indeks intelektual manusia.

Proses penyusunan Renja dilakukan dalam rangkaian penyusunan RKPD sebagaimana berikut digambarkan keterkaitan serta tahapan penyusunan Renja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Gambar 1.1  
Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renja dengan RKPD



(Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Untuk melaksanakan program pembangunan tahun 2025, maka diperlukan kebijakan dan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Perhubungan Kota Bekasi tahun 2025 berdasarkan kebutuhan yang berorientasi skala prioritas sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5987);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Instruksi Mentri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Perangkat Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 Dan Daerah Otonom Baru;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 6);

21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 10);
24. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025;
25. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 19);
26. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor        Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor        ).
27. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 13).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Bekasi adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Perubahan Perhubungan adalah sebagai berikut :

- Sebagai landasan penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2025 dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada OPD.
- Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
- Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan.
- Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan.

- Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas pengawasan yang lebih profesional.
- Sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Untuk mengetahui gambaran umum tentang pembangunan Kota Bekasi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi tahun 2025

### **1.1 Sistematika Penulisan**

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025 memiliki sistematika penulisan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Daerah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025**

Bab II Menjelaskan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 dan capaian Renstra Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Di samping itu, pada Bab II diuraikan analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, riview terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

#### **BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025**

Bab III menjelaskan tentang pergeseran, penyesuaian, atau penambahan kegiatan yang dilakukan Dinas Perhubungan akibat adanya perubahan kondisi atau kebijakan.

#### **BAB IV PENUTUP**

Bab IV memuat kesimpulan dari rencana kerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi dan rekomendasi rencana tindak lanjut dari permasalahan yang ada.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TRIWULAN II TAHUN 2025**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II**

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025 sampai dengan triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi selama tahun 2025 sampai dengan triwulan II.

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Perhubungan Kota Bekasi melaksanakan 2 (dua) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp.205.472.804.270,00 dan setelah efisiensi anggaran pada Triwulan I menjadi Rp.203.383.859.470,00. Adapun sumber dananya adalah dari APBD Kota Bekasi.

Hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Bappelitbangda tahun 2025 sampai dengan triwulan II secara rinci ditunjukkan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Hasil Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Bekasi Triwulan II Tahun 2025**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2025 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	
									I		II									
									8		9									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					100%	203.383.859.470,00	1,53	26.074.451.579,00	17,35	34.552.416.154,00	18,88	60.626.867.733,00	18,88	29,81	18,88	60.626.867.733,00			
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					100%	203.383.859.470,00	1,53	26.074.451.579,00	17,35	34.552.416.154,00	18,88	60.626.867.733,00	18,88	29,81	18,88	60.626.867.733,00			
2.15.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00 %	2.879.950.000.000,00	100,00 %	48.556.209.939,00	100,00 %	96.484.832.070,00	2,59	15.664.363.019,00	21,11	20.486.196.023,00	23,70	36.150.559.042,00	23,70	37,47	23,70	36.150.559.042,00	23,70	1,26
1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran					100%	73.000.000,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1,00 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					5,00 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	40,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan					100%	42.138.354.000,00	17,32	6.255.015.203,00	40,47	7.578.648.883,00	57,79	13.833.664.086,00	57,79	32,83	57,79	13.833.664.086,00	57,79	0,48
1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					2.506,00 Orang/bulan	42.135.354.000,00	868,00	6.255.015.203,00	1.026,00	7.578.648.883,00	1.894,00	13.833.664.086,00	75,58	32,83	1.894,00	13.833.664.086,00	1.894,00	0,00
1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					5,00 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	40,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2025 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		
									I		II										
		Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00 %				100,00 %														
1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah					100%	738.160.500,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					1,00 Paket	444.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					50,00 Orang	293.705.500,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00 %				100,00 %														
1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan					100%	1.653.776.500,00	0,00	0,00	19,44	899.783.475,00	19,44	899.783.475,00	19,44	54,41	19,44	899.783.475,00	19,44	0,03	
1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1,00 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					2,00 Paket	168.459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1,00 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	1,00	98.003.500,00	1,00	98.003.500,00	100,00	98,00	1,00	98.003.500,00	1,00	0,00	
1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					4,00 Paket	923.227.500,00	0,00	0,00	3,00	801.779.975,00	3,00	801.779.975,00	75,00	86,85	3,00	801.779.975,00	3,00	0,00	
1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					2,00 Paket	219.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1,00 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					1,00 Laporan	100.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1,00 Laporan	67.333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1,00 Dokumen	4.882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00 %				100,00 %														

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2025 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	
									I		II									
1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel					100%	784.630.000,00	0,00	0,00	50,00	83.394.300,00	50,00	83.394.300,00	50,00	10,63	50,00	83.394.300,00	50,00	0,00
1.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					1,00 Unit	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					25,00 Unit	84.630.000,00	0,00	0,00	25,00	83.394.300,00	25,00	83.394.300,00	100,00	98,54	25,00	83.394.300,00	25,00	0,00
1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan					100%	49.124.587.920,00	12,50	9.409.347.816,00	12,50	11.516.355.765,00	25,00	20.925.703.581,00	25,00	42,60	25,00	20.925.703.581,00	25,00	0,73
1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12,00 Laporan	1.306.600.000,00	3,00	113.306.396,00	3,00	246.451.135,00	6,00	359.757.531,00	50,00	27,53	6,00	359.757.531,00	6,00	0,00
1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					0,00 Laporan	47.817.987.920,00	3,00	9.296.041.420,00	3,00	11.269.904.630,00	0,00	20.565.946.050,00	0,00	43,01	0,00	20.565.946.050,00	0,00	0,01
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12,00 Laporan		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	
1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel					100%	1.972.323.150,00	0,00	0,00	15,62	408.013.600,00	15,62	408.013.600,00	15,62	20,69	15,62	408.013.600,00	15,62	0,01
1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					9,00 Unit	180.000.000,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	22,22	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					149,00 Unit	1.104.459.150,00	0,00	0,00	60,00	408.013.600,00	60,00	408.013.600,00	40,27	36,94	60,00	408.013.600,00	60,00	0,00
1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					50,00 Unit	87.864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					3,00 Unit	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2025 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	
							I	II												
2.15.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase ruas jalan yang memenuhi kelancaran jalan	91,00 %	15.970.000.000,00	95,40 %	57.113.155.758,00	91,00 %	106.899.027.400,00	0,00	10.410.088.560,00	11,96	14.066.220.131,00	11,96	24.476.308.691,00	10,88	22,90	11,96	24.476.308.691,00	11,96	153,26
2.2.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Indeks Perengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas					100%	93.802.116.760,00	0,00	10.410.088.560,00	18,33	12.437.124.119,00	18,33	22.847.212.679,00	18,33	24,36	18,33	22.847.212.679,00	18,33	143,06
2.2.02.1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun					2,00 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.02.2	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia					4.766,00 Unit	14.234.785.900,00	0,00	0,00	715,00	1.654.400.000,00	715,00	1.654.400.000,00	15,00	11,62	715,00	1.654.400.000,00	715,00	0,10
2.2.02.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara					0,00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.02.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara					3.636,00 Unit	79.367.330.860,00	0,00	10.410.088.560,00	1.454,00	10.782.724.119,00	1.454,00	21.192.812.679,00	39,99	26,70	1.454,00	21.192.812.679,00	1.454,00	1,33
		Persentase peningkatan fasilitas prasarana penunjang transportasi	60,00 %				60,00 %													
2.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase peningkatan fasilitas prasarana penunjang transportasi					100%	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.03.8	Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C	Jumlah sistem informasi manajemen yang terpasang di terminal tipe C baik secara Manual dan Digital					0,00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.03.1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara					2,00 Unit	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase peningkatan fasilitas prasarana penunjang transportasi					100%	993.143.200,00	0,00	0,00	100,00	725.878.950,00	100,00	725.878.950,00	100,00	73,09	100,00	725.878.950,00	100,00	4,55
2.2.04.1	Fasilitasi Penuhuan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Penuhuan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					0,00 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2025 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	
									I		II									
2.2.04.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota					1,00 Laporan	793.143.200,00	0,00	0,00	1,00	725.878.950,00	1,00	725.878.950,00	100,00	91,52	1,00	725.878.950,00	1,00	0,05
		Jumlah kendaraan yang wajib uji yang melakukan uji kendaraan bermotor	78,00 %				78,00 %													
2.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang wajib uji yang melakukan uji kendaraan bermotor					100%	1.832.320.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.05.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia					56,00 Unit	217.748.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.05.3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar					69.000,00 Unit	714.572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.05.4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					1,00 Dokumen	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.05.7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara					21,00 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Persentase penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas	10,60 %				10,60 %													
2.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas					100%	2.109.146.487,00	0,00	0,00	0,00	513.780.000,00	0,00	513.780.000,00	0,00	24,36	0,00	513.780.000,00	0,00	3,22
2.2.06.4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota					14,00 Laporan	524.104.000,00	0,00	0,00	0,00	123.100.000,00	0,00	123.100.000,00	0,00	23,49	0,00	123.100.000,00	0,00	0,01
2.2.06.8	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun					2,00 Unit	160.716.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.06.1 3	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)					2,00 Unit	177.787.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2025 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)							
									I		II															
2.2.06.16	Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan					14,00 Dokumen	746.538.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.2.06.17	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi					2,00 Laporan	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	390.680.000,00	0,00	390.680.000,00	0,00	78,14	0,00	390.680.000,00	0,00	0,02						
2.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas					100%	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.2.08.7	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum					0,00 Laporan	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Persentase peningkatan layanan angkutan umum massal	60,00 %				60,00 %																			
2.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kapasitas angkutan umum yang terpenuhi					100%	7.601.500.000,00	0,00	0,00	18,18	389.437.062,00	18,18	389.437.062,00	18,18	5,12	18,18	389.437.062,00	18,18	2,44						
2.2.09.2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					1,00 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.2.09.3	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia					33,00 Unit	7.401.500.000,00	0,00	0,00	12,00	389.437.062,00	12,00	389.437.062,00	36,36	5,26	12,00	389.437.062,00	12,00	0,02						
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)															18,18	5,12	18,18	389.437.062,00	18,18	18,18	389.437.062,00	18,18	18,18	389.437.062,00	18,18	18,18
Rata-rata capaian kinerja Program (%)															11,96	22,90	11,96	24.476.308.691,00	11,96	11,96	24.476.308.691,00	11,96	11,96	24.476.308.691,00	11,96	153,26
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)															18,88	29,81	18,88	60.626.867.733,00								

Sumber: Hasil perhitungan evaluasi berbasis kinerja (output) dan E-Monev Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II Bulan Juni

Apabila dilihat dari hasil evaluasi dalam e-monev yang berbasis kinerja output, rata-rata realisasi *output* Dinas Perhubungan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 18,88% dengan realisasi anggarannya sebesar 29,81% atau sebesar Rp.60.626.867.733,00 (enam puluh milyar enam ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).

Apabila dilihat dari hasil evaluasi berbasis progres fisik, realisasi fisik pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 48% dengan realisasi anggarannya sebesar 29,85% atau sebesar Rp.60.709.686.220,00 (enam puluh milyar tujuh ratus sembilan juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus dua puluh rupiah).

Berdasarkan indikator sasaran strategis yang hendak dicapai, capaian realisasi kinerja dan keuangan sampai triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.2

**Pencapaian Program dan Kegiatan Tahun 2025 Dinas Perhubungan**

No	Program	Jumlah Kegiatan	Prosentase Pelaksanaan	
			Target	Realisasi Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7	100%	37,55%
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	7	100%	22,90%
	Jumlah	14	100%	29,85%

*Sumber* : SIPD Penatausahaan Keuangan Daerah 30 Juni 2025

Adapun beberapa kegiatan yang anggaran dan kinerjanya belum terealisasi yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya,
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.

Banyaknya kegiatan yang belum berjalan pada Triwulan II dikarenakan adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Bekasi Nomor 900.1.1/1257/BPKAD.Ang tentang Tindak lanjut Surat Edaran Walikota Bekasi Nomor 900.1.1/651/BPKAD.Ang Tentang Efisiensi Belanja Daerah dan Rasionalisasi Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sehingga kegiatan tersebut belum bisa dilaksanakan pada Triwulan II.

## **2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

Permasalahan dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan di bidang perhubungan diperlukan identifikasi berdasarkan kekuatan dan kelemahan untuk mengetahui dinamika permasalahan internal serta peluang dan tantangan untuk mengetahui dinamika permasalahan yang berasal dari luar.

### **a. Kekuatan**

1. Komitmen aparatur Dinas Perhubungan Kota Bekasi;
2. Adanya Tugas Pokok dan Fungsi yang jelas;
3. Tersedianya sarana kerja yang memadai;
4. Adanya rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas LLAJ dan terminal;
5. Tersedianya gedung pengujian kendaraan bermotor dan peralatannya.

### **b. Kelemahan**

1. Sebaran SDM/tenaga teknis yang memiliki kemampuan profesional dan mempunyai kompetensi belum merata dalam berbagai bidang tugas;
2. Keterbatasan SDM terutama yang memiliki latar belakang pendidikan transportasi, kelalulintasan, teknik mesin, serta yang memiliki kemampuan IT diatas rata-rata;
3. Kurang optimalnya kondisi peralatan pendukung yang dimiliki;
4. Masih lemahnya pelaksanaan sistem dan mekanisme koordinasi.

### **c. Peluang**

1. Tersedianya angkutan umum yang melayani Wilayah Kota Bekasi;
2. Letak geografis Kota Bekasi yang strategis karena sebagai penyangga Ibukota Jakarta;
3. Adanya regulasi tentang pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dilakukan oleh Dinas Perhubungan;
4. Adanya dukungan dari pemerintah pusat, Provinsi dan *Stakeholder* lainnya;

5. Adanya peranan media massa cetak dan elektronik yang cukup besar dalam menyebarkan informasi.

d. Tantangan

1. Belum terlaksananya rencana umum transportasi perkotaan yang baik;
2. Meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi sebagai akibat mudahnya memperoleh fasilitas kredit dan menurunnya kualitas, kuantitas sarana dan prasarana transportasi publik yang berdampak munculnya daerah rawan kemacetan;
3. Kondisi terminal kurang memenuhi persyaratan pelayanan angkutan yang diindikasikan dengan kurang tersedianya lahan sesuai pelayanan dan adanya aksesibilitas dari dan ke terminal yang masih terhambat oleh aktivitas lain;
4. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam pelaksanaan tata kelola transportasi perkotaan;
5. Adanya potensi bidang perhubungan yang belum tergarap secara maksimal.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan tahun sebelumnya dan memiliki dampak negatif bagi keberlanjutan pelaksanaan pemerintahan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi yang telah dilakukan dan identifikasi masalah yang ada, ditetapkan isu-isu strategis pemerintahan tahun 2026 sebagai berikut :

1. Kemacetan lalu lintas, adapun faktor yang mempengaruhinya tingkat pelayanan jalan (LOS) cukup rendah masih terdapat 24 titik kemacetan, tidak seimbang pertumbuhan jumlah kendaraan dengan penambahan jaringan jalan, fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, *traffic light*) yang umur pakainya sudah lama sehingga memerlukan perbaikan / penggantian, Penyediaan lahan parkir yang memadai di beberapa titik rawan kemacetan dan penanganan serta penertiban parkir liar, peningkatan aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan, kurangnya SDM MRL.
2. Belum optimalnya angkutan umum dan massal, faktor yang mempengaruhi fasilitas pendukung transportasi (terminal, halte) yang perlu penanganan lebih lanjut agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi, keselamatan transportasi dengan pengujian kelaikan pengoperasian kendaraan umum dan barang

disertai penyediaan alat uji kendaraan bermotor yang memadai serta belum adanya aplikasi teknologi informasi dalam pelayanan angkutan umum massal. Hal ini juga ditunjukkan dengan belum tercapainya indikator pada SDGs yaitu persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan

Dalam menyikapi isu-isu diatas Dinas Perhubungan Kota Bekasi menempuh beberapa hal diantaranya yaitu meningkatkan kinerja aparatur melalui bimtek/diklat, membangun sarana dan prasarana perhubungan, melakukan penataan fasilitas lalu lintas, meningkatkan pengendalian dan pengawasan lalu lintas serta perparkiran dan dengan peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi melalui penguatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan digitalisasi berdasarkan isu strategis.

### 2.3 Perkiraan Pencapaian Kinerja tahun 2025

Tahun 2025 merupakan tahun kedua periode RENSTRA 2024 – 2026 dan merupakan periode menilai keberhasilan kinerja SKPD dalam memberi pelayanan kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya. Berbagai indikator pelayanan SKPD yang telah ditetapkan dalam renstra akan menjadi tolok ukur pencapaian fungsi pelayanan SKPD.

Perkiraan pencapaian kinerja dapat dilakukan dengan melakukan analisa terhadap kemampuan keuangan, SDM dan fasilitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kinerja SKPD. Melalui proses perencanaan yang matang, program/kegiatan yang akan dilaksanakan dapat direncanakan progres pelaksanaan sampai berakhirnya tahun anggaran.

Dalam Renja perubahan tahun 2025 menetapkan 1 sasaran strategis, 4 indikator kinerja, 2 program, 15 kegiatan 40 Sub Kegiatan.

Perkiraan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan tahun 2025 sesuai dengan penetapan kinerja 2025 adalah sebagai berikut :

#### Sasaran Strategis : Meningkatnya kelancaran lalu lintas

Indikator I: **Persentase penurunan rata-rata V/C Rasio dengan target capaian 1,41%**

No	Program/sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Sub Kegiatan	Target
	1	2	3
I	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Indeks Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas</b>	<b>84%</b>
1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 Unit

2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	4585 Unit
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	45 Unit

Indikator II: **Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan dengan target capaian 0,28**

No	Program/sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Sub Kegiatan	Target
	1	2	3
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Persentase penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas</b>	<b>12%</b>
		<b>Jumlah kendaraan yang wajib uji yang melakukan uji kendaraan bermotor</b>	<b>69000</b>
1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan
2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	14 Dokumen
3	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	14 Laporan
4	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun	2 Unit
5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	2 Unit
6	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Unit
7	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	69000 Unit
8	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dokumen
9	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	21 Unit

Indikator III: **Persentase Peningkatan Prasarana dan Sarana Perhubungan dengan target capaian 15.00%**

No	Program/sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Sub Kegiatan	Target
	1	2	3
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Persentase peningkatan fasilitas prasarana penunjang transportasi</b>	<b>51,72</b>
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan

Indikator IV: **Persentase peningkatan pemenuhan pelayanan angkutan umum dengan target capaian 32.00%**

No	Program/sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Sub Kegiatan	Target
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Persentase kapasitas angkutan umum yang terpenuhi</b>	<b>50%</b>
1	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan
2	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	21 Unit
3	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen

Berdasarkan uraian indikator kinerja beserta target pencapaian yang ditetapkan, diharapkan pada tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Bekasi dapat mencapai target kinerja sebesar seratus persen.

#### **2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam pelaksanaan Musrenbang disampaikan usulan kegiatan dari masyarakat yang ditujukan kepada Perangkat Daerah Kota Bekasi. Dalam

Musrenbang Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan, maupun Tingkat Kota. Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Bekasi yang ditujukan kepada Dinas Perhubungan Kota Bekasi sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Daftar Kegiatan Hasil Verifikasi Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Bekasi Tahun 2025**

No	PROGRAM/KEGIATAN .SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	SATUAN	PAGU USULAN
1	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)					
1.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					
1.1.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					
		RT.1 RW.14 Kel.Jatiwaringin Kec.Pondokgede, Kota Bekasi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	paket	Rp 100,000,000.00
		RT.7 RW.14 Kel.Jatiwaringin Kec.Pondokgede, Kota Bekasi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	paket	Rp 100,000,000.00
		RT.1 RW.6 Kel.Jatiwaringin Kec.Pondokgede, Kota Bekasi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	paket	Rp 100,000,000.00
		RT.01 s.d 06 RW.06 Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	20	Titik	Rp 100,000,000.00
		RW 011 Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu Kota Bekasi, Kota Bekasi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	paket	Rp 75,000,000.00
		RT 02 RW 08 Kel. Banatargebang Kec. Bantargebang, Kota Bekasi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10	Titik	Rp 100,000,000.00
		Jl.RT.05 RW.04 Kel. Bintara Kec Bekasi Barat, Kota Bekasi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10	Unit	Rp 100,000,000.00

No	PROGRAM/KEGIATAN .SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	SATUAN	PAGU USULAN
		Rt.05 Rw.09 kel.Jatimakmur Kec.PondokGede. , Kota Bekasi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	15	titik	Rp 100,000,000.00
		RT 06 RW 03 Jaka Mulya Bekasi Selatan, Kota Bekasi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	20	Titik	Rp 75,000,000.00
		RT 03 RW 03 Jaka Mulya Bekasi Selatan, Kota Bekasi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	20	Titik	Rp 75,000,000.00
		RW 04, BINTARA, BEKASI BARAT, Kota Bekasi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	8	titik	Rp 50,000,000.00
		PERUM VIOLET GARDEN, JL. I GUSTI NGURAH RAI, KRANJI, BEKASI BARAT, Kota Bekasi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	8	titik	Rp 50,000,000.00
		Jalan Matador RT 001/008 Kel.Jatirangga Kec.Jatisampurna , Kota Bekasi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	40	titik	Rp 100,000,000.00
		Jalan Lingkungan RT 003/013 Kel.Jatirangga Kec.Jatisampurna , Kota Bekasi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	20	titik	Rp 100,000,000.00
<b>JUMLAH</b>						<b>Rp1,225,000,000.00</b>

**BAB III**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PERUBAHAN**  
**DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025**

Dalam upaya mewujudkan program-program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap kemampuan yang ada, Dinas Perhubungan telah menyusun rencana strategis dinas yang akan menjadi pedoman bagi kegiatan program sektor perhubungan.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Surat Edaran Wakil Wali Kota Bekasi Nomor 000.7.2.4/1053/BAPPELITBANGDA-AP4EP tentang Pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025.

Adapun perubahan Rencana Program dan Kegiatan Dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Awal				Perubahan			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			205.472.804.270				189.649.069.816		
2	15	1	2		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA			97.027.487.070				88.821.285.486		
						Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran		100%				100%		
						Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		94.42%				94.42%		
						Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah		86.5%				86.5%		
						Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		100%				100%		
2	15	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	100%	73.000.000	PAD	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	100%	73.000.000	PAD
2	15	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	3 Dokumen	70.000.000	PAD	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	1 Dokumen	70.000.000	PAD

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Awal				Perubahan			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
2	15	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	9 Laporan	3.000.000	PAD	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	5 Laporan	3.000.000	PAD
2	15	1	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>100%</b>	<b>42.138.354.000</b>	<b>PAD</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>100%</b>	<b>54.443.724.000</b>	<b>PAD</b>
2	15	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	2506 Orang/bulan	42.135.354.000	PAD	Kota Bekasi	2506 Orang/bulan	54.440.724.000	PAD
2	15	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi	1 Laporan	3.000.000	PAD	Kota Bekasi	5 Laporan	3.000.000	PAD
2	15	1	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>100 %</b>	<b>832.655.000</b>	<b>PAD</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>100 %</b>	<b>964.007.466</b>	<b>PAD</b>
2	15	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Bekasi	1 Paket	444.455.000	PAD	Kota Bekasi	1 Paket	610.301.966	PAD
2	15	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bekasi	8 Orang	388.200.000	PAD	Kota Bekasi	50 Orang	53.705.500	PAD
				11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bekasi	- orang	-	PAD	Kota Bekasi	275 Orang	300.000.000	PAD
2	15	1	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>100 %</b>	<b>1.972.081.000</b>	<b>PAD</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>100 %</b>	<b>1.585.408.802</b>	<b>PAD</b>
2	15	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Paket	20.000.000	PAD	Kota Bekasi	1 Paket	20.000.000	PAD
2	15	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Paket	225.709.000	PAD	Kota Bekasi	2 Paket	0	PAD

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Awal				Perubahan			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
2	15	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Paket	100.000.000	PAD	Kota Bekasi	1 Paket	253.589.000	PAD
2	15	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Paket	1.079.620.000	PAD	Kota Bekasi	4 Paket	923.227.500	PAD
2	15	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Paket	228.000.000	PAD	Kota Bekasi	2 Paket	111.732.000	PAD
2	15	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Dokumen	50.000.000	PAD	Kota Bekasi	1 Dokumen	50.000.000	PAD
2	15	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	1 Laporan	113.870.000	PAD	Kota Bekasi	1 Laporan	154.645.302	PAD
2	15	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	1 Laporan	150.000.000	PAD	Kota Bekasi	1 Laporan	67.333.000	PAD
2	15	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bekasi	1 Dokumen	4.882.000	PAD	Kota Bekasi	1 Dokumen	4.882.000	PAD
2	15	1	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>100 %</b>	<b>902.350.000</b>	<b>PAD</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>100 %</b>	<b>2.386.945.034</b>	<b>PAD</b>
2	15	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Unit	700.000.000	PAD	Kota Bekasi	1 Unit	700.000.000	PAD
2	15	1	2.08	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kota Bekasi	-	-	PAD	Kota Bekasi	169 Unit	702.008.034	PAD
2	15	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Bekasi	39 Unit	202.350.000	PAD	Kota Bekasi	25 Unit	984.937.000	PAD
2	15	1	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>100 %</b>	<b>49.124.587.920</b>	<b>PAD</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>100 %</b>	<b>27.359.431.034</b>	<b>PAD</b>
2	15	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Laporan	1.306.600.000	PAD	Kota Bekasi	12 Laporan	1.256.600.000	PAD

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Awal				Perubahan			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
2	15	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Laporan	47.817.967.920	PAD	Kota Bekasi	12 Laporan	26.102.831.034	PAD
2	15	1	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>100 %</b>	<b>1.984.459.150</b>	<b>PAD</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>100 %</b>	<b>2.008.769.150</b>	<b>PAD</b>
2	15	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bekasi	9 Unit	180.000.000	PAD	Kota Bekasi	9 Unit	180.000.000	PAD
2	15	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bekasi	156 Unit	1.104.459.150	PAD	Kota Bekasi	149 Unit	1.104.459.150	PAD
2	15	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Bekasi	50 Unit	100.000.000	PAD	Kota Bekasi	50 Unit	87.864.000	PAD
2	15	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bekasi	2 Unit	600.000.000	PAD	Kota Bekasi	3 Unit	636.446.000	PAD
2	15	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>				<b>108.445.317.200</b>				<b>100.827.784.330</b>	
						<b>Indeks Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas</b>		<b>84</b>				<b>84</b>		
						<b>Persentase penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas</b>		<b>12%</b>				<b>12%</b>		
						<b>Jumlah kendaraan yang wajib uji yang melakukan uji kendaraan bermotor</b>		<b>69.000 Kendaraan</b>				<b>69.000 Kendaraan</b>		
						<b>Persentase peningkatan fasilitas prasarana penunjang transportasi</b>		<b>51,72%</b>				<b>51,72%</b>		
						<b>Persentase kapasitas angkutan umum yang terpenuhi</b>		<b>50%</b>				<b>50%</b>		

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Awal				Perubahan			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
2	15	2	2.02		<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Perlengkapan Jalan yang tersedia</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>100%</b>	<b>93.981.067.760</b>	<b>PAD</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>100%</b>	<b>92.462.070.690</b>	<b>PAD</b>
2	15	2	2.02	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Kota Bekasi	2 Unit	200.000.000	PAD	Kota Bekasi	2 Unit	200.000.000	PAD
2	15	2	2.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Bekasi	4585 Unit	13.842.576.900	PAD	Kota Bekasi	4766 Unit	15.590.805.900	PAD
2	15	2	2.02	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kota Bekasi	8 Unit	200.000.000	PAD	Kota Bekasi	0 Unit	0	PAD
2	15	2	2.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kota Bekasi	45 Unit	79.738.490.860	PAD	Kota Bekasi	3636 Unit	76.671.264.790	PAD
2	15	2	2.06		<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>100%</b>	<b>2.793.135.487</b>		<b>Kota Bekasi</b>	<b>100%</b>	<b>2.734.146.487</b>	
2	15	2	2.06	16	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	2 Laporan	900.000.000	PAD	Kota Bekasi	2 Laporan	1.050.000.000	PAD
2	15	2	2.06	8	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	Kota Bekasi	14 laporan	756.135.247	PAD	Kota Bekasi	14 laporan	746.538.247	PAD
2	15	2	2.06	8	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun	Kota Bekasi	2 Unit	160.716.800	PAD	Kota Bekasi	2 Unit	160.716.800	PAD
2	15	2	2.06	10	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Kota Bekasi	2 Unit	177.787.440	PAD	Kota Bekasi	2 Unit	177.787.440	PAD
2	15	2	2.06	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	14 Laporan	798.496.000	PAD	Kota Bekasi	14 Laporan	599.104.000	PAD

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Awal				Perubahan			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
2	15	2	2.08		<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>Persentase Pembinaan, Pengendalian dan Penindakan Lalu Lintas</b>	Kota Bekasi	100%	200.000.000	PAD	Kota Bekasi	100%	0	PAD
2	15	2	2.08	7	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi pegemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	1 Laporan	200.000.000	PAD	Kota Bekasi	0 Laporan	0	PAD
2	15	2	2.09		<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Umum Massal</b>	Kota Bekasi	100%	7.601.500.000	PAD	Kota Bekasi	100%	2.752.200.000	PAD
2	15	2	2.09	3	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Bekasi	70 Unit	7.401.500.000	PAD	Kota Bekasi	21 Unit	2.701.500.000	PAD
2	15	2	2.09	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	1 Laporan	200.000.000	PAD	Kota Bekasi	1 Laporan	50.700.000	PAD
2	15	2	2.03		<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>Persentase Peningkatan Pelayanan Terminal</b>	Kota Bekasi	100%	750.000.000	PAD	Kota Bekasi	100%	550.000.000	PAD
2	15	2	2.03	8	Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C`	Jumlah sistem informasi manajemen yang terpasang di terminal tipe C baik secara Manual dan Digital	Kota Bekasi	2 Unit	200.000.000	PAD	Kota Bekasi	2 Unit	0	PAD
2	15	2	2.03	7	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Kota Bekasi	2 Unit	550.000.000	PAD	Kota Bekasi	0 Unit	550.000.000	PAD
2	15	2	2.04		<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Penertiban Parkir</b>	Kota Bekasi	100%	993.143.200	PAD	Kota Bekasi	100%	793.143.200	PAD

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Awal				Perubahan			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
2	15	2	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	1 Laporan	793.143.200	PAD	Kota Bekasi	1 Laporan	793.143.200	PAD
2	15	2	2.04	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Bekasi	1 Dokumen	200.000.000	PAD	Kota Bekasi	0 Dokumen	0	PAD
2	15	2	2.05		<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>Persentase Kendaraan yang laik jalan</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>100%</b>	<b>2.126.470.753</b>	<b>PAD</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>100%</b>	<b>1.436.223.953</b>	<b>PAD</b>
2	15	2	2.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Kota Bekasi	30 Unit	400.348.753	PAD	Kota Bekasi	56 Unit	156.601.953	PAD
2	15	2	2.05	3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Kota Bekasi	1 Unit	726.122.000	PAD	Kota Bekasi	69.000 Unit	714.572.000	PAD
2	15	2	2.05	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Bekasi	9 Dokumen	500.000.000	PAD	Kota Bekasi	1 Dokumen	100.000.000	PAD
2	15	2	2.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Kota Bekasi	1 Unit	500.000.000	PAD	Kota Bekasi	21 Unit	465.050.000	PAD
2	15	2	2.10		<b>Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>Kota Bekasi</b>	<b>100%</b>	<b>100.000.000</b>	

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Awal				Perubahan			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
2	15	2	2.10	1	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	-	0	PAD	Kota Bekasi	1 Dokumen	100.000.000	PAD
					<b>JUMLAH</b>		<b>205.472.804.270</b>				<b>189.649.069.816</b>			

Sumber : SIPD -RI.kemendagri.go.id/penganggaran ABT Tahun 2025

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun 2025. Perubahan Renja ini diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi dengan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Bekasi, sehingga target kinerja pada akhir tahun periode Renstra dapat tercapai.

Dinas Perhubungan melaksanakan satu urusan yaitu urusan perhubungan. Urusan perhubungan diprioritaskan pada peningkatan manajemen transportasi darat, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur perhubungan, dan peningkatan pelayanan angkutan. Dalam hal ini terdapat kaidah-kaidah pelaksanaan dan catatan penting yang perlu diperhatikan dalam pembuatan Renja Dinas Perhubungan Kota Bekasi tahun 2025.

#### 1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dalam Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025 dapat berjalan dengan baik maka perlu kaidah pelaksanaan yang harus diperhatikan yaitu :

- a. Dinas Perhubungan Kota Bekasi harus mampu melaksanakan tujuan, sasaran, program, kegiatan yang ada didalam Perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025.
- b. Dinas Perhubungan Kota Bekasi berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2025 sesuai dengan Renja Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025 dan RKPD Kota Bekasi Tahun 2025.
- c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025, Kepala Dinas harus mengawasi dan mengevaluasi pencapaian program dan kegiatan tahun 2025.

#### 2. Rencana Tindak Lanjut

Adapun tindak lanjut yang perlu diperbaiki dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan tahun 2025, hal ini untuk menjadi perhatian yang diharapkan tidak terulang kembali pada penyusunan Renja di tahun selanjutnya, antara lain:

- a. Perlu adanya kerja sama yang baik antara unsur eksekutif dan legislatif dalam memberikan data maupun informasi yang diperlukan, agar dalam penyusunan Renja dapat berjalan lancar.

- b. Perlu adanya saran dan kritik yang membangun dalam merumuskan program/kegiatan Dinas Perhubungan agar dalam pelaksanaan program/kegiatan ditahun selanjutnya dapat tercapai dengan baik.
- c. Program dan kegiatan yang disusun dalam Renja ini merupakan program dan kegiatan yang bersifat indiktif, sehingga dalam pelaksanaannya akan sangat tergantung pada kondisi, regulasi, prioritas, dan ketersediaan anggaran pemerintah daerah pada tahun anggaran bersangkutan.

Dalam pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025, dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang terakomodir.

Sebagai konsekuensinya diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025.

Bekasi, Agustus 2025  
Kepala Dinas Perhubungan,



Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Zeno'.

Zeno Bachtiar, S.Si.T., M.Si., M.T  
Pembina Tk.I/IV.b  
NIP. 19730211 199203 1 002